

Strategi Partai Baru: Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Menuju Elektoral 2024

Tian Adhia Nugraha¹, Hening Ginanjar Mukti²
^{1,2} Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Dikirimkan: 02 Juli 2023

Direvisi: 28 September 2023

Diterbitkan: 30 September 2023

INTISARI

Studi ini berupaya untuk memahami strategi yang dilakukan oleh Partai Gelombang Rakyat (Gelora) sebagai partai baru dalam pemilihan umum 2024 di Indonesia. Sebagai partai baru, Partai Gelora perlu memiliki strategi untuk berkontestasi dengan partai-partai besar di Indonesia. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Partai Gelora, penulis menggunakan kerangka teori Lucardie (2000) dalam menganalisis partai baru dan Mietzner (2008) untuk melihat kondisi kepartaian di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kualitatif untuk mendalami strategi yang dilakukan oleh partai politik baru yaitu Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Penulis menemukan bahwa Partai Gelora berkontestasi dan berkompromi dengan partai lain sebagai strategi untuk memenangkan suara pada Pemilu 2024 di Indonesia. Partai Gelora menantang ideologi partai sebelumnya yang cenderung agamis dengan membawa ideologi baru yaitu nasionalis. Strategi Partai Gelora menyesuaikan dengan kondisi elektoral Indonesia yang menunjukkan arah yang sentripetal. Hal ini ditunjukkan melalui strategi yang dilakukan Partai Gelora dengan melakukan kompromi dengan partai lain dalam kemenangan pemilu. Sebagai partai baru, Partai Gelora menggunakan strategi *catch-all party*, strategi tersebut dilakukan guna memperoleh basis pemilih dalam pemilihan 2024. Strategi *catch-all* menjadikan Partai Gelora mencairkan basis ideologi yang bertujuan untuk menjadikan Partai Gelora lebih inklusif.

KATA KUNCI

Strategi Partai Baru, kontestasi, elektoral 2024, *catch-all party*, Partai Gelora.

Pendahuluan

Studi ini bertujuan untuk memahami upaya yang dilakukan oleh Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sebagai partai baru dalam kontestasi pemilihan umum 2024. Sebagai partai baru, Partai Gelora perlu bersiap untuk menghadapi kontestasi diantara partai-partai besar, terutama dalam pertarungan elektoral di tahun 2024. Dalam menganalisis Partai Gelora sebagai partai yang baru berdiri, penulis menggunakan kerangka pemikiran dari Paul Lucardie (2000) tentang teori partai politik baru. Selain itu, untuk melihat strategi kompromi dan kontestasi

Korespondensi:

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No.1, Bulaksumur Yogyakarta, 55281.

Email: tianadhianugraha@mail.ugm.ac.id

yang dilakukan oleh Partai Gelora, penulis menggunakan kerangka Marcus Mietzner (2008) tentang kondisi kepartaian di Indonesia.

Teori tentang partai politik baru (*the emergence of new parties*) oleh Lucardie dapat membantu untuk mengelompokkan atau mengetahui jenis partai politik baru. Lucardie mengelompokkan kedalam tiga jenis yaitu; *Prophets*, *Purifiers*, dan *Prolocutors* (Lucardie, 2000). Pengelompokan tersebut untuk memudahkan mengenali jenis partai baru berdasarkan ideologi yang dikembangkan atau diubah dari sebelumnya. Teori partai politik baru yang ditulis oleh Lucardie sebenarnya merupakan pengembangan dari penulis sebelumnya yaitu Thomas Rochon (1985), dalam teori partai politik baru antara Rochon dan Lucardie memiliki kesamaan sebagai teori untuk menganalisa dasar dari kesuksesan partai politik dalam pemenangan elektoral.

Partai Gelora sebagai partai baru bila dilakukan analisis menggunakan pendekatan Lucardie akan muncul jawaban bahwa Partai Gelora merupakan partai *purifier* yang ditandai dengan perbedaan ideologi dari partai sebelumnya. Partai Gelora merupakan partai yang dibuat oleh dua orang mantan anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam pembentukannya, Partai Gelora memiliki ideologi nasionalis, namun dalam pembentukannya tidak lepas dari faksionalisasi partai islam (Argenti, 2021). Dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Partai Gelora dalam kontestasi di Pemilu 2024, bukan hanya kontestasi, studi ini akan melihat apa yang dilakukan Partai Gelora untuk bertahan sebagai partai baru. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, analisa studi kasus deskriptif dan teknik pengambilan data melalui data primer serta sekunder. Dengan menggunakan teori Lucardie, Partai Gelora berupaya untuk menantang partai sebelumnya dalam posisi ideologis, walaupun dalam strategi yang dilakukan Partai Gelora untuk memenangkan pemilih dengan mengambil pemilih dari partai sebelumnya (Argenti, 2021).

Hal yang menarik dari Partai Gelora adalah ideologi yang berbeda dengan partai induknya yaitu PKS, walaupun stigma terhadap Anis Matta akan 'jelas' beranggapan bahwa Partai Gelora merupakan partai islam. Namun, yang menjadi lebih menarik dari Partai Gelora adalah melawan kebiasaan faksionalisasi partai di Indonesia. Partai Gelora yang memiliki ideologi nasionalis berbeda dengan partai induknya yaitu PKS yang agamis partai Islam. Berbeda dengan faksionalisasi yang telah ada sebelumnya, seperti Partai Golkar dengan Hanura atau Gerindra yang keduanya memiliki kesamaan berhaluan nasionalis, atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Partai Bintang Reformasi yang keduanya berhaluan partai Islam (Argenti, 2021).

Diskusi mengenai penjelajahan literatur yang berkaitan dengan artikel ini terbagi menjadi dua klaster literatur. Klaster pertama fokus pada strategi partai dalam pemenangan elektoral, terdapat Hanafi (2018) yang membahas mengenai tantangan partai politik baru dalam pemilu di Indonesia dan Park (2021) yang melakukan pendalaman terhadap Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki strategi tertentu untuk memenangkan pemilu. Klaster kedua mendiskusikan mengenai kondisi sistem elektoral yang ditulis oleh Emanuele dan Chiaramonte (2019) yang membahas mengenai partai politik baru yang memberikan dampak terhadap kondisi

elektoral di Eropa Barat dan Bantel (2023) yang membahas mengenai perbedaan kubu politik.

Penelitian pada klaster pertama mendiskusikan mengenai strategi partai dalam pemenangan elektoral. Hanafi (2018) mengeksplorasi kemunculan dan tantangan yang dihadapi oleh partai politik baru pada Pemilu 2019 di Indonesia. Partai politik baru menjadi peluang untuk pemilih yang ingin mendapatkan pembaharuan dalam kepartaian. Partai politik baru ini menggunakan corak nasionalis dengan membawa program yang tidak berbeda jauh dengan partai baru lainnya. Program yang dimiliki oleh partai politik baru ini menjadi basis kekuatan untuk memenangkan pemilu karena dalam segi kepemimpinan partai politik baru tidak memiliki figur yang kuat dan basis akar rumput yang lemah (Hanafi, 2018).

Park (2021) melakukan pendalaman mengenai keberhasilan sebuah partai Islam yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di salah satu wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Katolik di Ngada, Flores, Indonesia. Park (2021) berargumen bahwa PKS melakukan strategi untuk menarik pemilih dengan cara proyek kesamaan (*project of commonness*) atau adaptasi dengan pola personalistik lokal yang berlaku. Namun, popularitas PKS hanya berjalan dalam pemilu 2014. Strategi PKS untuk elektoral tahun 2019 di Ngada mengalami perubahan strategi yang berbeda dengan *project of commonness* yang dilakukan PKS sebelum 2014. Perubahan strategi ditandai dengan pergantian kepemimpinan di wilayah tersebut yang mengadopsi program nasional seperti biasanya, perubahan tersebut menjadikan PKS kehilangan pemilih di Ngada, Flores (Park, 2021).

Penelitian pada klaster kedua mendiskusikan mengenai kondisi elektoral. Emanuele dan Chiaramonte (2019) fokus pada *Party System Innovation* (PSInn) yaitu dampak yang diberikan oleh partai-partai baru terhadap sistem kepartaian Eropa Barat. Hasil dari analisis Emanuele dan Chiaramonte (2019) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam PSInn selama dekade terakhir terutama dalam arena elektoral yang ditandai dengan perubahan jumlah pemilih. Emanuele dan Chiaramonte (2019) berargumen bahwa walaupun dalam kondisi stabilitas tradisional sistem partai di Eropa Barat, dalam situasi tertentu dapat memunculkan partai-partai baru, terutama berkaitan dengan dampak dari resesi hebat (*great recession*) yang menimbulkan gelombang demobilisasi pemilih. Resesi tersebut memberikan peluang bagi pengusaha politik untuk menciptakan partai baru yang dapat bersaing dalam pemilu, memasuki parlemen, dan mendapatkan akses ke pemerintahan (Emanuele dan Chiaramonte, 2019).

Bantel (2023) mendiskusikan mengenai polarisasi afektif yang terjadi di demokrasi Barat. Temuan dari penelitian Bantel (2023) bahwa polarisasi afektif dapat bertindak sebagai pertahanan melawan penantang radikal dari kubu lain. Demarkasi antar kubu politik menjadikan polarisasi semakin dalam. Bantel (2023) mengumpulkan data survei dari 23 negara demokrasi dari tahun 1993 sampai 2019. Artikel ini menunjukkan kubu kiri dan kanan yang paling terpengaruh polarisasi. Persaingan dan perpecahan antara kubu kiri dan kanan akan menghilang ketika mereka menduduki dan memerintah dalam pemerintahan yang sama. Begitu juga dengan perpecahan kubu akan berakibat memperdalam polarisasi afektif dalam sistem multi partai.

Penelitian yang telah ada membahas mengenai strategi politik dan kondisi elektoral. Pada klaster pertama, penelitian fokus pada bagaimana partai politik baru berupaya untuk meraih ceruk suara dan bagaimana partai PKS mendapatkan popularitas pada tahun 2019. Penelitian oleh Hanafi (2018) tidak mengkaji partai politik secara khusus dimana Hanafi (2018) mengambil sampel dari seluruh partai politik baru yang bertanding pada pemilu 2019. Penelitian ini memberikan pendalaman terkait partai politik baru yaitu partai Gelora dalam upaya memenangkan ceruk pemilih. Kemudian, Park (2021) membahas mengenai partai PKS dimana partai tersebut bukanlah partai yang baru berdiri, maka PKS akan lebih mapan dalam pemilihan strategi. Berbeda dengan partai Gelora dimana partai tersebut akan memberikan kejutan dalam strategi yang akan dijalankan untuk memenangkan elektoral, maka peneliti fokus pada partai baru agar mengetahui secara mendalam bagaimana strategi yang akan dijalkannya. Pada klaster kedua, peneliti telah menampilkan literatur mengenai kondisi elektoral di Eropa Barat (Emanuele dan Chiamonte, 2019) dan polarisasi afektif di demokrasi barat (Bantel, 2023). Peneliti berupaya untuk menjelaskan kondisi elektoral yang fokus dengan konteks Indonesia dimana peneliti mengambil konsepsi Mietzner (2008) untuk memahami konteks perubahan spektrum politik ideologi pasca pemerintahan Soeharto. Peneliti melihat bahwa perubahan tersebut menimbulkan potensi akan lahirnya partai politik baru karena partai politik yang cenderung merapat ke tengah (*centripetal*) bersifat kompromi antar satu partai dengan partai lainnya.

Tulisan ini ingin mengelaborasi secara mendalam mengenai strategi yang dilakukan oleh partai baru dalam pemenangan elektoral 2024 di Indonesia. Tulisan ini juga mendalami strategi yang dilakukan oleh partai politik baru untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sistem ideologi kepartaian di Indonesia. Selain itu, studi ini menunjukkan strategi partai politik baru yang menggunakan kompromi dan kontestasi dengan partai politik lain untuk bertahan dan menang dalam elektoral 2024. Penelusuran melalui studi yang mendalam terhadap Partai Gelora menunjukkan bahwa partai Gelora menjadi partai yang berkontestasi sekaligus berkompromi untuk memenangkan ceruk pemilih dalam pesta demokrasi.

Studi ini dilakukan dengan menggunakan pandangan Lucardie terkait teori partai baru (*the emergence of new parties*). Menurut Lucardie, hal mendasar yang dapat menjadikan partai politik baru sukses dalam kontestasi elektoral ketika partai baru tersebut memiliki proyek politik yang menangani masalah-masalah urgen oleh sebagian besar pemilih, kemudian dalam segi sumber daya termasuk anggota, pendanaan, manajemen tim, dan exposure media, yang terakhir yaitu peluang struktur politik termasuk kondisi kelembagaan, sosial ekonomi, dan budaya (Lucardie, 2000). Setidaknya ketika partai politik yang baru saja berdiri berhasil menuntaskan ketiga hal diatas, menurut Lucardie dipastikan partai politik yang walaupun baru dapat memenangkan kontestasi elektoral.

Lucardie dalam mengelompokkan partai politik baru membaginya kepada tiga hal; *pertama* partai politik *prophetic* yaitu partai politik yang mengangkat ideologi baru, partai kelompok *prophetic* merupakan partai yang benar-benar mengangkat ideologi baru; *kedua* partai politik *purifier* yaitu partai politik yang tidak mengikuti ideologi yang telah ada sebelumnya, ketiga partai politik *prolocutors* yaitu partai

politik yang menjadi perwakilan dari partai politik yang mapan untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan yang diabaikan, partai jenis *prolocutor* ini menyampaikan kepentingan yang diabaikan tanpa mengacu kepada ideologi tertentu (Lucardie, 2000).

Pandangan Lucardie sebenarnya merupakan pengembangan dari pandangan Rochon, beberapa klasifikasi ditambahkan oleh Lucardie untuk membedakan kebaruan ideologi dari partai-partai baru yang belum dijelaskan oleh Rochon. Partai dengan klasifikasi *purifier* bila melihat kepada pandangan Rochon akan serupa dengan partai *challenger* yaitu partai yang menantang legitimasi partai lama bahwa partai lama sudah tidak lagi mewakili kepentingan mereka (Rochon, 1985:421). Sedangkan partai dengan klasifikasi *prophetic* dan *prolocutor* merupakan pengembangan dari *mobilizing parties*, partai-partai *mobilizer* menjadi partai yang mengambil keuntungan dari perubahan kondisi politik dan sosial dengan melakukan mobilisasi identitas baru (Rochon, 1985).

Kondisi elektoral Indonesia pasca pemerintahan Soeharto menunjukkan perubahan ke arah sentripetal, sedangkan sebelum masa tersebut, kondisi elektoral di Indonesia menunjukkan arah yang lebih sentrifugal. Kondisi sentrifugal dan sentripetal akan mempengaruhi strategi partai dalam bertarung di pemilihan umum, terutama di Indonesia. Mietzner (2008) melihat perbedaan yang mendasar diantara partai politik pada 1950-an dan masa reformasi disebabkan oleh karakter antar partai yang berbeda sesuai dengan masanya (Mietzner, 2008:431). Dalam sistem kepartaian, partai pasca kemerdekaan lebih mengutamakan spektrum politik ideologi, sedangkan pasca pemerintahan Soeharto lebih mengedepankan sistem yang cenderung mendekat ke tengah (Mietzner, 2008:433).

Perbedaan yang paling menunjukkan dalam kepartaian di Indonesia pasca Soeharto adalah ketiadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan partai sayap kiri lainnya (Mietzner, 2008:439). Sistem kepartaian di Indonesia menunjukkan arah yang lebih sentripetal. Sartori (1976) menerangkan dalam sistem kepartaian yang sentripetal, kompetisi antar partai berada di tengah, kompetisi tersebut bertujuan untuk menambah basis suara dan meningkatkan peluang untuk berkuasa.

Studi ini menggunakan metode kualitatif untuk mendalami strategi yang dilakukan oleh partai politik baru yaitu Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Penulis mencari dan mengumpulkan data melalui jurnal, buku, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara terhadap pengurus Partai Gelora yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, penulis melakukan interpretasi makna dari data yang telah dikumpulkan (Cresswell, 2009).

Menganalisis Keberhasilan Partai Gelora dalam Elektoral 2024

Partai Gelora berdiri pada 28 Oktober 2019 oleh Anis Matta dan Fahri Hamzah melalui perjalannya yang diawali dari Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi). Jelang satu tahun dari pendirian pada tahun 2019, Partai Gelora resmi menjadi partai politik setelah mendapatkan surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM pada 2020 (Saptohutomo, 2022). Menjelang perhelatan Pemilu 2024, terdapat 24 partai politik yang mengajukan untuk berkontestasi pada Pemilu 2024, namun hanya 18 partai yang

lolos secara administrasi untuk mengikuti perhelatan tersebut. Partai Gelora menjadi partai yang lolos verifikasi administrasi Pemilu 2024 (Tempo, 2022). Sebagai partai baru, lolos verifikasi untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024 menjadi hal yang luar biasa.

Lucardie (2000) menegaskan bahwa faktor keberhasilan partai baru dalam mengikuti kontestasi elektoral adalah ketika proyek politik berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan penting yang sedang dirasakan oleh rakyat. Proyek politik ini selain bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, digunakan untuk menjaring suara untuk pemilihan. Salah satu cara untuk menjaring suara pemilih adalah melalui ideologi, sebagaimana ideologi yang dianut oleh Partai Gelora adalah nasionalis-islam (Ridwan, 2019), ideologi tersebut menjadi tantangan dan kelebihan bagi Partai Gelora.

Faktor keberhasilan kedua adalah melalui sumber daya yang dimiliki oleh partai tersebut. Lucardie menegaskan sumber daya dalam hal ini termasuk anggota, pendanaan, manajemen tim, dan exposure media. Sebagai partai baru, tantangan Partai Gelora adalah untuk mendapatkan sumber daya tersebut, berbeda dengan partai lama atau besar yang telah memiliki sumber daya anggota, pendanaan, bahkan exposure media.

Faktor keberhasilan ketiga adalah peluang politik yang dimiliki oleh Partai Gelora. Peluang politik ini akan berhubungan dengan kondisi di partainya maupun peluang yang ada di masyarakat secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Sebagaimana partai yang baru berdiri, ini menjadi tantangan bagi Partai Gelora. Partai tersebut perlu dengan cermat untuk mendapatkan peluang dari berdirinya Partai Gelora dengan ideologi yang berbeda dengan partai sebelumnya, hal tersebut dapat menjadikan keuntungan bagi Partai Gelora dalam segi pemilih atau pendukung, karena pemilih akan lebih luas dengan beragam keyakinan dari nasionalis hingga Islam.

Partai Gelora sebagai Partai Penantang

Sebagaimana Lucardie (2000) menjelaskan pada teorinya tentang kemunculan partai baru, terdapat jenis partai baru yang menantang ideologi lama dengan membawa ideologi baru sebagai acuan dalam berpolitik. Hal ini dilakukan oleh Partai Gelora bersama para pendirinya Anis Matta dan Fahri Hamzah. Pada pendirian Partai Gelora yang diungkap oleh Anis Matta bahwa munculnya Partai Gelora dikarenakan konflik internal di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anis Matta melanjutkan bahwa ideologi Partai Gelora berasaskan Pancasila dengan jati diri Islam (Sudrajat, 2019). Walaupun memiliki kesamaan Islam, namun Partai Gelora menekankan bahwa partainya menganut nasionalis. Partai Gelora juga secara gamblang menegaskan dirinya adalah buah dari “secret society”. PKS yang terlalu tertutup dari mereka yang bukan dari golongannya adalah masalah utama partai dan pada akhirnya Partai Gelora walaupun terlahir dari PKS memilih untuk lebih moderat (Nurhaliza, 2022).

Partai Gelora dalam hal ini menjadi partai *challenger/purifier* dalam kerangka pemikiran Lucardie bahwa Partai Gelora menentang ideologi partai sebelumnya PKS. Dalam penantangannya, Anis Matta juga menekankan bahwa partai Gelora bukanlah

PKS Perjuangan, dapat dimaknai sebagai, Partai Gelora tidak dapat disamakan dengan PKS bahwa Partai Gelora akan menjadi partai yang menyatukan masyarakat Indonesia melalui ideologi nasionalis sebagaimana diungkapkan oleh Anis Matta (Sudrajat, 2019).

Dalam upaya untuk menantang partai sebelumnya, Partai Gelora melakukan beberapa cara diantaranya mengambil basis anggota partai dari PKS, menantang ideologi partai sebelumnya, mengambil massa yang lebih luas dari pemilih nasionalis dan Islam, dan menantang kebiasaan Faksionalisasi partai-partai di Indonesia.

Kepemilikan sumber daya anggota menjadi salah satu faktor kemenangan kontestasi elektoral dalam kerangka Lucardie (2000), sumber daya anggota menjadi faktor penting untuk kelangsungan partai. Partai Gelora sebagai partai baru memerlukan sumber daya ini untuk berkembang dan bertahan. Beberapa anggota PKS pindah ke Partai Gelora dengan alasan tidak ada perubahan di partai PKS (Sari, 2019). Bila ditelisik makna dibalik perpindahan kader PKS ke Partai Gelora menunjukkan kekecewaan anggota PKS akibat tidak adanya perkembangan, sehingga ini menjadi kesempatan bagi Partai Gelora untuk menantang PKS dengan mengusung ideologi yang berbeda dengan PKS.

Ideologi Partai Gelora yaitu nasionalis-Islam, berbeda dengan PKS yang berideologi Islam. Bukan tanpa alasan pemilihan ideologi oleh Partai Gelora, salah satu alasannya karena Anis Matta (pendiri Gelora) ingin meninggalkan pemisahan politik lama antar spektrum ideologi yang berbeda yang menyebabkan masyarakat Indonesia tidak bersatu (Sudrajat, 2019). Tidak hanya itu, kekecewaan para pendiri Partai Gelora menjadi sebab bergantinya ideologi. Pergantian Ideologi ini akan mempengaruhi partai politik dalam mengimplementasikan program atau kebijakannya (Alfirdaus, 2019), termasuk upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui politik programatik. Apalagi keluarnya para petinggi PKS didasari dari kekecewaan terhadap PKS, sehingga melalui Partai Gelora para petinggi yang keluar dari PKS dan mendirikan Gelora dapat memperbaiki kekurangan di partai sebelumnya. Ideologi yang dipilih oleh Partai Gelora menunjukkan peluang bagi partai tersebut untuk mendapat pemilih atau simpatisan yang lebih luas, terutama spektrum nasionalis dan religius, berbeda dengan partai sebelumnya yaitu PKS yang menargetkan pemilih hanya dari sisi religius (Islam), ini menjadi peluang bagi Partai Gelora.

Partai Gelora menantang faksionalisasi partai di Indonesia, ditunjukkan melalui ideologi berbeda yang dianut oleh partai Gelora dengan partai sebelumnya PKS. Partai Gelora melawan kebiasaan partai di Indonesia terkait faksionalisasi, seperti Partai Islam Masyumi yang melahirkan Partai NU yang keduanya masih berada pada spektrum ideologi yang sama atau Partai Golkar yang berspektrum nasionalis melahirkan Hanura, Gerindra, dan Nasdem (Argenti, 2021).

Membangun Catch-All Party

Banyaknya partai politik yang bersaing dalam pemilu membuat partai politik kesulitan untuk mendapatkan suara yang hanya mengandalkan segmen massa politik yang terbatas. Banyak partai politik harus gulung tikar akibat kurangnya dukungan untuk memenuhi *electoral threshold*. Begitupun nasib partai politik yang lulus

electoral threshold, dengan segmen pemilih yang sempit, mengalami penurunan jumlah dukungan pemilih akibat ketidakmampuannya dalam meraih dan mempertahankan simpati pemilih. Kondisi ini telah mendorong partai-partai untuk memperluas segmen massa pemilihnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Partai Nasionalis maupun Partai Islam terus berusaha melakukan pembenahan agar dapat tetap *survive*. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membenahi platform ideologis mereka atau bahkan lebih jauh membuat partai baru demi membenahi ideologi partai (Erawan, 2008).

Dengan demikian, demi memperoleh suara yang lebih besar dalam pemilu, ada kecenderungan partai-partai melakukan pencairan basis ideologi mereka, dengan cara merubah sifat organisasi yang eksklusif menjadi inklusif. Perubahan ini membuka kemungkinan bagi partai untuk melakukan reposisi dan redefinisi fungsi mereka yang semakin jelas dan efektif dalam dinamika politik (Katz dan Mair, 1995). Partai tidak sekedar berfungsi sebagai pencari legitimasi (perspektif partai elit) atau menyalurkan aspirasi massa (perspektif partai massa). Perubahan ini terjadi karena masuknya perspektif perilaku rasional kedalam wacana perdebatan ilmiah mengenai peran dan fungsi partai politik (Downs, 1957).

Kenyataan tersebut di atas dipengaruhi oleh adanya perkembangan aspirasi politik masyarakat yang membangun kesadaran dari para pelaku politik untuk berpikir bagaimana bisa merangkul berbagai kepentingan yang ada. Apalagi hal ini didukung oleh keyakinan LaPalombara dan Weiner (1966) bahwa kegagalan partai politik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berkembang merupakan penyebab utama matinya sebuah partai politik (LaPalombara dan Weiner, 1966). Dengan demikian banyak partai yang aktif dalam menjangkau aspirasi yang berkembang, dan hal ini telah melahirkan format baru dalam partai politik yang dikenal dengan *catch-all party*.

Perubahan ini menurut Riswanda Imawan (2004), membuka kemungkinan bagi partai untuk melakukan reposisi dan redefinisi fungsi mereka yang semakin jelas dan efektif dalam dinamika politik. Partai tidak sekedar berfungsi sebagai pencari legitimasi (perspektif partai elit) atau menyalurkan aspirasi massa (perspektif partai massa). Perubahan ini terjadi karena masuknya perspektif perilaku rasional ke dalam wacana perdebatan ilmiah mengenai peran dan fungsi partai politik. Terbentuknya *catch-all party* di era multipartai merupakan kelanjutan politik era Orde Baru yang menolak ideologi kiri-kanan, sehingga kedua spektrum ideologi harus hilang. Hilangnya ideologi ini menurutnya justru akan menghancurkan negara seperti yang terjadi di negara-negara sosialis. Untuk melukiskan kondisi tersebut, Riswanda mengutip pernyataan Bell, 'bahwa bangkrutnya negara-negara sosialis adalah akibat kosongnya makna dikotomi "kiri kanan" dalam perspektif ideologi politik. Ia berpendapat bahwa bila kubu tengah terbentuk karena penolakan terhadap kubu "kiri atau kanan", maka format *catch-all party* itu sendiri merupakan refleksi dari kehadiran satu ideologi baru.

Tanpa ideologi terbuka kemungkinan politik mengarah kepada pragmatisme dan oportunisme yang sangat akut. Logika produsen-konsumen yang merupakan pondasi pasar ekonomi menjadi dasar dalam kebijakan partai, yang menurut Riswanda logika ini mengandaikan bahwa segala pergulatan politik bergantung pada

kreatifitas elit dalam menggiring politik untuk larut ke dalam jualan politik yang ditawarkan. Selanjutnya ia mengatakan bahwa bila kalkulasi elit ini terjadi dalam sistem politik di mana personifikasi institusi masih berlaku, maka format *catch-all party* berpotensi melahirkan oligarki dalam tubuh partai itu sendiri. Dan ini bertentangan dengan jati diri dari partai politik sebagai pilar demokrasi.

Kenyataan tersebut di atas dipengaruhi oleh adanya perkembangan aspirasi politik masyarakat yang membangun kesadaran dari para pelaku politik untuk berpikir bagaimana bisa merangkul berbagai kepentingan yang ada. Apalagi hal ini didukung oleh kenyataan bahwa kegagalan partai politik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berkembang merupakan penyebab utama matinya sebuah partai politik. Dengan demikian banyak partai yang aktif dalam menjaring aspirasi yang berkembang, dan hal ini telah melahirkan format baru dalam partai politik yang dikenal dengan *catch-all party*.

Posisinya berada di antara kutub dikotomi partai elit dan partai massa. Menurut Riswanda, format ini mengagungkan pragmatisme dan rasionalitas sebagai pilar penyangga sistem politik yang demokratis. Dengan prinsip pragmatisme dan rasionalitas ini dimungkinkan bagi masyarakat untuk berpikir tentang “politik tanpa alur” (*politics without cliches*), tidak menjadi tawanan ideologi, sehingga masyarakat mampu menyikapi berbagai masalah tanpa prakonsepsi, tanpa distorsi ideologis, dan tanpa kekakuan bersikap partisan. Melalui kerangka penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa Partai Gelora memenuhi syarat untuk dikatakan menjadi partai yang bercorak *catch-all*, terutama soal ketidakjelasan ideologi yang mereka anut. Tentunya dengan perbandingan partai induk mereka yang cenderung lebih jelas dari segi ideologi partai.

Strategi Catch-All Partai Gelora

Strategi Partai Gelora diprioritaskan untuk mencapai target utama yakni lolos verifikasi administrasi dan faktual sebagai peserta Pemilu di tahun 2024. Dalam Undang-Undang Pemilu No. 17 Tahun 2017 persyaratan untuk lolos sebagai peserta Pemilu, salah satu yang terberat adalah partai harus memiliki kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota di setiap provinsi, memiliki kepengurusan di 50 persen kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki anggota minimal 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan dengan bukti kartu anggota.

Hal ini terkonfirmasi (walaupun sedikit ditutup-tutupi) dengan bekerja kerasnya pengurus Partai Gelora pada tahap verifikasi faktual. Sebagai contoh, pada saat melakukan wawancara, penulis mendapati sekretaris Partai Gelora sedang berkoordinasi dengan anggotanya perihal belum terpenuhinya syarat-syarat verifikasi faktual di Provinsi Yogyakarta. Mulai dari sinilah strategi-strategi corak *catch-all party* sangat terlihat. Pengurus Partai Gelora secara gamblang menyebutkan bahwa mereka menggunakan cara-cara seperti partai lain. Seperti halnya bagi-bagi sembako, tebar janji politik, dan tentunya politik uang (wawancara : 15 November 2022).

Partai Gelora berusaha untuk sebisa mungkin mewakili populasi pemilih yang ada untuk mencapai target ini. Lebih lanjut hal ini merupakan turunan dari ideologi

Partai Gelora yang menginginkan partai yang inklusif dan moderat tidak seperti partai induknya. Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah upaya mereka untuk mengakomodir apapun yang masyarakat minta dan butuhkan bukan dengan cara Partai Gelora menawarkan sesuatu. Agaknya hal ini adalah pertanda penting bahwa strategi dengan cara seperti ini jelas merupakan pencirian partai *catch-all*, tidak menawarkan program berdasar ideologi partai tetapi lebih berfokus pada apa yang masyarakat minta dan butuhkan dalam rangka menjaring konstituen.

Dua target dan proyeksi di atas menempatkan Partai Gelora dalam posisi berkompetisi dengan berbagai aktor politik. Sebagai *catch-all party*, setidaknya ada tiga strategi utama untuk merebut basis massa yang tersedia. Pertama, mereka memboyong loyalis Anis Matta dan Fahri Hamzah. Strategi ini juga diikuti dengan pemindahan gerbong faksi kesejahteraan lewat pembentukan GARBI yang bermuara pada Partai Gelora. Strategi ini terbukti dengan mayoritas pengurus Partai Gelora merupakan eks-PKS yang loyal terhadap Anis Matta yang melihat harapan dengan adanya fleksibilitas ideologi yang Anis Matta bawa. Tidak hanya eks-PKS, tetapi ternyata juga membawa dampak pada organisasi sayap PKS melalui gerakan tarbiyah. Banyak sekali kader-kader organisasi tarbiyah (terutama di universitas) yang memiliki visi dan misi politik yang kental dan sadar kebutuhan perubahan ideologi kemudian menjadi simpatisan Anis Matta dan bergabung dengan Partai Gelora.

Kedua, dalam pengembangannya Partai Gelora berfokus pada pencarian kader yang berkualitas terutama mereka yang memiliki sumber daya yang kuat dan masih muda. Partai Gelora nampaknya sadar betul bahwa sebagai partai baru mereka membutuhkan sumber daya yang kuat di tiap daerah. Strategi ini terkonfirmasi dengan disebutkan sumber daya yang dimiliki oleh pengurus Partai Gelora. Sebagai contoh, Ketua DPW Partai Gelora Provinsi DIY memiliki banyak sekali usaha terutama dibidang kuliner. Kemudian, Sekretaris DPW Partai Gelora Provinsi DIY merupakan kontraktor. Begitu pula dengan Ketua DPW Partai Gelora di kabupaten-kabupaten lain di DIY juga merupakan pengusaha yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh partai (wawancara : 15 November 2022). Lebih lanjut, perlu diingat bahwa dari beberapa pengurus Partai Gelora yang disebutkan diatas mayoritas memiliki umur dibawah 30 tahun.

Strategi menysasar kader bersumberdaya dan berumur muda merupakan pilihan cerdas bagi Partai Gelora tetapi perlu diingat bahwa ini adalah langkah awal terbukanya peluang oligarki yang pada akhirnya juga akan membawa dampak buruk bagi partai. Strategi ini juga memiliki kelemahan di sisi penempatan kader muda dibawah umur 30 yang sudah menjadi pemimpin pengurus daerah. Bukan perihal bagaimana ini akan menjadi investasi panjang bagi Partai Gelora tetapi disisi lain kader muda minim pengalaman dan cenderung belum dikenal oleh masyarakat luas akan merugikan Partai Gelora pada Pemilu 2024.

Kemudian yang ketiga, Partai Gelora sebagai partai baru berusaha berkolaborasi dengan partai lain (tidak memandang dari partai mana) dalam pilkada. Sebagai contoh Partai Gelora Yogyakarta berhasil menjadi kolaborator dengan memenangkan 2 dari 3 pilkada yang ada di DIY. Mereka menyebutkan alasan mereka tidak memandang alasan dari partai mana calon yang mereka usung di dalam Pilkada adalah demi pengenalan Partai Gelora sebagai partai baru agar lebih dikenal oleh

populasi yang ada (wawancara : 15 November 2022). Mereka lebih memilih untuk mengutamakan faktor calon kepala daerah berdasarkan kompetensi dan program yang ditawarkan serta kesesuaian dengan visi dan misi Partai Gelora. Sekali lagi corak partai *catch-all* sangat tergambar di sini.

Strategi Kompromi Partai Gelora

Partai Gelora Indonesia merupakan partai baru yang dibentuk pada 2019 oleh Anis Matta, Fahri Hamzah, dan beberapa tokoh yang bergabung dalam pembentukan partai tersebut. Dalam segi ideologi, partai Gelora mengangkat ideologi nasionalis (Argenti, 2021). Bahkan dalam wawancara penulis dengan narasumber, menyebutkan bahwa Partai Gelora merupakan partai yang ingin mewakili populasi, Partai Gelora tidak memaksakan ideologi tertentu terhadap masyarakat (wawancara : 15 November 2022). Bila melihat pada kerangka Mietzner (2008) dan Sartori (1976) dengan sistem kepartaian di Indonesia yang lebih mengarah ke sentripetal, maka strategi yang dilakukan Partai Gelora adalah dengan mengangkat ideologi nasionalis dan mewakili populasi, karena basis suara masyarakat yang berada di tengah. Strategi yang dilakukan oleh Partai Gelora dapat meningkatkan peluang untuk berkuasa.

Partai Gelora dengan posisi partai yang cenderung berada di tengah dalam spektrum Sartori (1976) memiliki strategi tertentu dalam memenangkan kontestasi dalam pemilihan umum. Dalam pemilihan ideologi Partai Gelora yang nasionalis dan ingin mewakili populasi memiliki strategi untuk melakukan kolaborasi bersama Partai lain di daerah. Terutama pemilihan yang berada di daerah dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), narasumber menyebutkan bahwa partai gelora berkomunikasi dan berkolaborasi bersama partai lain dalam pemilihan kepala daerah di DIY (wawancara : 15 November 2022) strategi kolaborasi tersebut terbukti membuahkan hasil, dari tiga Pilkada yang berada di DIY, 2 Pilkada dimenangkan oleh Partai Gelora (wawancara : 9 November 2022).

Partai Gelora dalam Pilkada DIY 2020 berperan sebagai partai pendukung. Ada tiga Pilkada di DIY, pemilihan untuk kepala daerah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunung Kidul. Partai Gelora di Sleman mendukung pasangan Kustini-Danang (Febriyanto, 2020), di Bantul mendukung Halim-Joko (Hidayat, 2020), dan di Gunung Kidul mendukung Bambang-Benjamin (Priatmojo, 2020). Partai Gelora berperan sebagai tim sukses dalam kemenangan pasangan-pasangan di pilkada tersebut (wawancara : 9 November 2022). Bahkan, Partai Gelora memiliki kantor tersendiri sebagai tim sukses dalam mendukung calon kepala daerah di DIY (wawancara : 15 November 2022). Dari ketiga calon pilkada yang didukung oleh Partai Gelora, dua pasangan yaitu Kustini-Danang di Sleman dan Halim-Joko di Bantul berhasil menjadi kepala daerah (Umadiyah, 2020). Ditegaskan oleh narasumber bahwa Partai Gelora sebagai partai pendukung dalam kemenangan Pilkada menawarkan sesuatu yang bisa dibantu oleh Partai Gelora untuk memenangkan Pilkada, seperti memberikan basis massa, usulan, dan strategi (wawancara : 15 November 2022).

Partai Gelora dalam melakukan kolaborasi didasarkan oleh kesamaan narasi atau ide. Dalam memilih figuritas tidak sembarangan, perlu dilihat narasi, pendapat, dan ide. Bila narasi dan ide sesuai dengan Partai Gelora, Partai Gelora akan berkolaborasi dan mendukung kemenangan (wawancara : 15 November 2022).

Ditegaskan juga oleh narasumber bahwa Partai gelora akan bertemu/berkolaborasi dan berpisah karena narasi, tidak melihat perbedaan warna, bila narasi yang dibawa berbeda maka akan berkontestasi, bila narasi yang diangkat sama, maka akan berkolaborasi. Kontestasi terjadi ketika berbeda narasi, Partai Gelora fokus bertarung pada ide dan narasi (wawancara : 15 November 2022).

Diluar dari narasi dan ide yang diutamakan oleh Partai Gelora. Penulis melihat terdapat pola bahwa Partai Gelora melakukan kolaborasi di tingkat DIY hanya dengan partai nasionalis. Pasangan Kustini-Danang di Sleman dan Bambang-Benyamin di Gunung Kidul merupakan rekomendasi PDI Perjuangan (PDIP) untuk DIY (Detik News, 2020). Partai pengusung Halim-Joko lebih cair, meski masih terdapat PDIP, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat (Hidayat, 2020). Melihat dari spektrum ideologi, ketiga pasangan yang didukung oleh Partai Gelora memiliki kemiripan yaitu berideologi nasionalis. Penulis melihat bahwa Partai Gelora berkolaborasi dengan sesama partai nasionalis.

Dengan kondisi sistem kepartaian Indonesia sekarang yang sentripetal, strategi Partai Gelora untuk mengangkat ideologi nasionalis terbukti meningkatkan peluang untuk berkuasa. Berbeda dengan sistem kepartaian yang sentrifugal, ideologi yang berbeda membuat partai di Indonesia kesulitan untuk berkolaborasi. Partai Gelora berkompromi dalam pertarungan Pilkada di DIY dengan partai lain, namun strategi yang dilakukan partai gelora mendapatkan hasil yaitu memenangkan Pilkada di DIY.

Berbicara mengenai kompromi, Thomas Meyer (2012) melihat kompromi sebagai cara untuk menghadapi konflik kepentingan. Kompromi menjadi suatu proses negosiasi untuk membuat semua pihak bahwa pencapaian nilai dan kepentingannya secara penuh tidak mungkin dilakukan. Kompromi menjadi suatu pandangan bahwa segala bentuk kesepakatan terhadap permintaan satu pihak dapat dilakukan untuk mendapatkan bagian-bagian lain yang lebih penting dari kepentingan yang dibawa salah satu pihak (Meyer, 2012:21). Meyer (2012) menambahkan bahwa kompromi sebenarnya memberikan kesempatan untuk sistem yang lebih stabil. Stabilitas dalam budaya demokrasi moderen dapat diperoleh dengan kompromi, keuntungan dan konsekuensi yang didapatkan dapat memberikan efek yang menstabilkan (Meyer, 2012:53). Kompromi menjadi strategi politik yang cerdas, seksama dan penuh pertimbangan (Meyer, 2012:54)

Partai Gelora melakukan langkah kompromi dengan berkolaborasi bersama partai lain dalam pemilihan kepala daerah di DIY. Partai Gelora tentu memiliki kepentingannya tersendiri, namun dengan kompromi yang melibatkan partai lain, kepentingan-kepentingan yang ada akan diinventarisir, setiap pihak akan mendapatkan posisi dalam kursi pemenang. Partai Gelora dalam konsepsi Meyer (2012) merupakan partai yang cerdas dengan melakukan kompromi. Dalam kompromi juga dapat mencegah eskalasi konflik (Meyer, 2012:54). Kesepakatan yang diambil dari awal dalam kompromi dapat mewakili kepentingan pihak yang lebih lemah, sehingga terjadi integrasi dalam keputusan politik yang disepakati (Meyer, 2012:54).

Strategi Kontestasi Partai Gelora

Dalam kerangka Sartori (1976), Partai Gelora dengan ideologi nasionalis berada di tengah. Strategi yang digunakan untuk memenangkan pemilu dengan kolaborasi, karena sentripetal yang dalam pertarungannya tidak berlandaskan ideologi. Namun, Partai Gelora tetap berkontestasi dalam pemilu di Indonesia. Strategi yang dilakukan Partai Gelora tidak sepenuhnya berkompromi, melainkan Partai Gelora ikut bertarung melawan partai lain. Namun, ada pengecualian yang berhubungan dengan sejarah pendirian Partai Gelora.

Partai Gelora didirikan oleh Anis Matta dan Fahri Hamzah, keduanya merupakan mantan kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bila melihat dari pendiriannya, Partai Gelora berbeda ideologi dengan PKS yang islamis (Argenti, 2021). Partai Gelora dengan ideologi nasionalis berupaya untuk menantang partai sebelumnya. Sebagaimana penuturan dari narasumber bahwa Partai Gelora merupakan opsi kedua yang sebenarnya Anis Matta dan Fahri Hamzah ingin memperbaiki PKS dari dalam (wawancara : 9 November 2022).

Partai Gelora menantang PKS dalam segi ideologi. Keduanya bertentangan dengan PKS yang islamis dan Gelora yang nasionalis. Partai Gelora melakukan pertarungan dengan partai selain ideologi nasionalis, terutama dengan partai PKS yang islamis. Kondisi kolaborasi yang dilakukan Partai Gelora di Pilkada DIY bersama partai nasionalis lainnya. Walaupun dalam kerangka Sartori (1976) dengan kondisi sentripetal masih memungkinkan untuk berkontestasi karena berebut pemilih yang terkonsentrasi di tengah.

Partai Gelora akan berkontestasi atau bertarung langsung dengan partai lain ketika berbeda dalam hal narasi maupun ide yang diangkat. Sebagaimana yang dituturkan oleh narasumber bahwa ketika tidak bertemu dalam narasi, maka pertarungan akan terjadi (wawancara : 15 November 2022). Partai Gelora sebenarnya tidak memandang warna untuk berkolaborasi atau berkontestasi, titik fokusnya terdapat di ide atau narasi. Narasumber menuturkan bahwa Partai Gelora prinsipnya kolaboratif, semua bisa menjadi lawan maupun kawan, bisa jadi dalam satu waktu akan berkolaborasi (wawancara : 15 November 2022). Bila sebelumnya telah dibahas bahwa Partai Gelora berkolaborasi dengan partai berideologi nasionalis, maka penulis melihat bahwa Partai Gelora berkontestasi dan bertarung dengan partai berideologi islamis, terutama kontestasi melawan PKS.

Saat Pilkada di DIY 2020, Partai Gelora menjadi partai pendukung untuk beberapa pasangan calon yang diusung. Partai Gelora mendukung pasangan calon yang diusung oleh partai-partai nasionalis dan tidak ada PKS. Padahal saat Pilkada di DIY terdapat pasangan lain namun Partai Gelora lebih memilih partai pengusung yang berideologi nasionalis. Misalnya, pada Pilkada Kabupaten Bantul terdapat pasangan calon Suharsono-Totok yang diusung oleh Partai Gerindra, Nasdem, Golkar, dan PKS (Syarifudin, 2020). Partai Gelora lebih mendukung paslon Bambang-Benyamin yang diusung oleh PDIP. Selain di Bantul, terjadi dalam Pilkada Sleman 2020, Partai Gelora mendukung pasangan Kustini-Danang yang diusung oleh PDIP dan PAN. Partai Gelora tidak memilih untuk mendukung pasangan lain, Sri-Amin salah satu partai yang mengusung adalah PKS, Danang-Agus partai yang mengusung adalah PPP, PKB, dan

Gerindra. Partai Gelora akan berkontestasi dengan partai islamis, dan berkolaborasi dengan partai nasionalis.

Strategi “Aman” Partai Gelora sebagai Partai Baru

Partai Gelora sebagai partai yang baru berdiri cenderung menggunakan strategi yang “aman” maksudnya berkontestasi sekaligus berkompromi dalam strategi partainya. Partai Gelora pada mulanya berdiri untuk menjadi partai yang menentang partai sebelumnya yaitu PKS dengan menjadi partai yang nasionalis. Tetapi dalam strategi yang dijalankan oleh partai Gelora, partai tersebut akan berkolaborasi dengan partai mana saja dengan syarat ide dan gagasan yang sama. Hal tersebut akan menjadikan partai Gelora berhaluan tidak hanya nasionalis tetapi ketika berkolaborasi dengan partai islamis maka partai Gelora akan berkompromi atas perbedaan ideologi tersebut. Kondisi tersebut menjelaskan keadaan sistem kepartaian yang sentrifugal dalam Mietzner (2008) dimana tidak ada kontestasi antar ideologi tetapi bersifat kompromi satu dengan yang lainnya. Kehadiran partai baru seharusnya menjadi sebuah peluang untuk berkontestasi dalam menawarkan perubahan dari partai-partai yang telah ada.

Sebagai partai baru, kompromi atau kolaborasi akan menguntungkan partai tersebut dimana partai yang baru berdiri akan mendapatkan dukungan tambahan dengan dilakukannya kolaborasi. Selain itu, Gelora sebagai partai baru menjadi jenis partai yang *catch-all* dimana segala bentuk strategi digunakan untuk memenangkan suara dari pemilih. Pada akhirnya, partai Gelora akan sama dengan partai-partai lainnya yang menggunakan berbagai strategi untuk memenangkan pemilu. Untuk kelangsungan partai baru, strategi tersebut akan memberikan dampak positif terhadap kelangsungan partai, tetapi bila strategi yang ditawarkan serupa dengan partai politik lain maka pemilih akan sadar bahwa perubahan yang disajikan tidak ada bedanya dengan partai lain. Sebagai partai baru seharusnya kebaruan tersebut menjadi momentum bagi partai Gelora untuk menampilkan gagasan baru yang berbeda dengan partai sebelumnya atau partai politik lainnya.

Partai Gelora merupakan partai penentang dalam konsepsi Rochon (1985) bahwa partai Gelora menantang legitimasi partai lama yaitu PKS karena tidak lagi mewakili kepentingan mereka. Partai Gelora dengan haluan nasionalis ingin memberikan inklusifitas dibandingkan dengan partai sebelumnya yaitu PKS yang islamis. Peneliti dengan kesimpulan partai Gelora merupakan partai yang *catch-all* berpotensi untuk menanggalkan komitmen partai dengan haluan nasionalisnya karena strategi *catch-all* cenderung akan menggunakan berbagai strategi untuk memenangkan pemilu.

Penutup

Kesadaran bahwa sebagai partai baru, Partai Gelora justru akan terkerdilkan jika melawan partai besar dan mapan adalah pilihan yang tepat dan menarik. Namun pilihan tersebut bukan tanpa celah. Bagai dua sisi mata uang, disatu sisi memang Partai Gelora akan mendapatkan panggung untuk membuktikan perannya dalam percaturan politik daerah dan tentunya akan mendapatkan *exposure* oleh populasi yang ada. Tetapi dilain sisi, figur kuat dari partai lain yang mereka usung justru

menjadi penghambat berkembangnya Partai Gelora. Ketika seorang aktor politik dengan figure kuat memenangkan pilkada nyatanya hal yang menjadi perhatian utama dari populasi adalah dari partai mana dia berasal dan apa yang dia citrakan sebagai figur yang kuat bukan soal siapa partai pengusung figur tersebut. Pada akhirnya Partai Gelora hanya akan mendapatkan keuntungan terbatas pada soal akses terhadap sumber daya yang dimiliki suatu daerah tetapi tidak mendapatkan keuntungan perihal pengambilan ceruk pemilih dalam populasi yang ada.

Konsepsi Mietzner (2008) dan Sartori (1976) menunjukkan sistem kepartaian Indonesia kontemporer yang sentripetal memperlihatkan partai-partai di Indonesia yang cenderung berada di tengah. Strategi yang dilakukan partai mengikuti sistem kepartaian yang sentripetal. Partai Gelora dalam melakukan kontestasi dan kompromi dipengaruhi oleh kondisi yang sentripetal. Dalam memenangkan ceruk pemilih, Partai Gelora mengangkat ideologi yang nasionalis dan berusaha untuk mewakili populasi di setiap daerahnya. Bahkan, Partai Gelora tidak hanya melakukan pertarungan secara langsung, kompromi dengan kolaborasi dilakukan oleh Partai Gelora.

Peneliti melihat bahwa strategi kompromi sekaligus kontestasi yang dilakukan oleh partai Gelora menjadi peluang yang baik bagi partai Gelora agar dapat bertahan sebagai partai yang baru berdiri. Namun, ketika partai Gelora sebagai partai baru dengan strategi yang serupa dengan partai lainnya maka momentum untuk dikenal sebagai partai baru yang memberikan gagasan berbeda dengan partai sebelumnya akan hilang karena strategi dan nilai tawar yang sama saja dengan partai-partai lain tidak membedakan partai baru dengan partai yang telah lama berdiri.

Daftar Pustaka

- Alfirdaus, L. K. (2019). Dari identitas ke ideologi: Penguatan arah kebijakan programatik partai politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 99. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i2.3886>
- Argenti, G. (2021, September). *Partai Baru Antara Partai Gelora, Partai Ummat, dan Partai Masyumi (Reborn)*. https://www.researchgate.net/publication/354378755_Partai_Baru_Antara_Partai_Gelora_Partai_Ummat_dan_Partai_Masyumi_Reborn
- Bantel, I. (2023). Camps, not just parties. The dynamic foundations of affective polarization in multi-party systems. *Electoral Studies*, 83, 102614. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102614>
- Cresswell, J. W. (2009). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). SAGE Publication.
- Detik News. (2020, July 17). *Pilkada 2020, Ini Dia 2 Paslon Jagoan PDIP di DIY*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5097405/pilkada-2020-ini-dia-2-paslon-jagoan-pdip-di-diy>
- Downs, A. (1957). An Economic Theory of Political Action in a Democracy. *Journal of Political Economy*, 65(2), 135–150. <http://www.jstor.org/stable/1827369>

- Emanuele, V., & Chiaramonte, A. (2019). Explaining the impact of new parties in the Western European party systems. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 29(4), 490–510. <https://doi.org/10.1080/17457289.2019.1666402>
- Febriyanto, N. (2020, September 2). *Partai Gelora Siap Dukung 20.000 Suara untuk KSP-Danang • Radar Jogja*. <https://radarjogja.jawapos.com/sleman-bantul/2020/09/02/partai-gelora-siap-dukung-20-000-suara-untuk-ksp-danang/>
- Hanafi, R. I. (2018). Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 197. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.761>
- Hidayat, T. (2020, August 27). *Partai Gelora Dukung AHM-JP di Pilbup Bantul 2020 - TIMES Indonesia*. <https://timesindonesia.co.id/politik/293264/partai-gelora-dukung-ahmjp-di-pilbup-bantul-2020>
- Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing Models of Party Organization and Party Democracy. *Party Politics*, 1(1), 5–28. <https://doi.org/10.1177/1354068895001001001>
- LaPalombara, J., & Weiner, M. (1966). *Political Parties and Political Development*. Princeton University Press.
- Lucardie, P. (2000). Prophets, purifiers and prolocutors: Towards a theory on the emergence of new parties. *Party Politics*, 6(2), 175–185. <https://doi.org/10.1177/135406880006002003>
- Meyer, T. (2012). *Kompromi Jalur Ideal Menuju Demokrasi*. Friedrich-Ebert-Stiftung .
- Mietzner, M. (2008). Comparing Indonesia's party systems of the 1950s and the post-Suharto era: From centrifugal to centripetal inter-party competition. *Journal of Southeast Asian Studies*, 39(3), 431–453. <https://doi.org/10.1017/S0022463408000337>
- Nurhaliza, S. (2022, June 24). *Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta Soroti Kesalahan Partai Islam*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/siti-nurhaliza-17/ketua-umum-partai-gelora-anis-matta-soroti-kesalahan-partai-islam?page=all>
- Park, J. H. (2021). The Electoral Paradox of Party Institutionalisation: The Case of PKS in Eastern Indonesia. *Asian Studies Review*, 45(4), 690–710. <https://doi.org/10.1080/10357823.2021.1931661>
- Priatmojo, G. (2020, September 11). *Partai Gelora Dukung Paslon Bambang Wisnu Handoyo di Pilkada Gunungkidul - Suarajogja.id*. <https://jogja.suara.com/read/2020/09/11/205000/partai-gelora-dukung-paslon-bambang-wisnu-handoyo-di-pilkada-gunungkidul>
- Ridwan, M. (2019, November 10). *Ungkap Ideologi Partai Gelora, Anis Matta Akui Sakit Hati dengan PKS*. <https://www.jawapos.com/nasional/politik/10/11/2019/ungkap-ideologi-partai-gelora-anis-matta-akui-sakit-hati-dengan-pks/>
- Rochon, T. (1985). Mobilizers and Challengers: Toward a Theory of New Party Success. *International Political Science Review*, 419–439. https://www.jstor.org/stable/pdf/1601053.pdf?refreqid=fastly-default%3Adb5b4128dof4d399b361589037373c26&ab_segments=0%2Fbasic_phrase_search%2Fcontrol&origin=search-results
- Saptohutomo, A. P. (2022, April 5). *Profil Partai Gelora, Jejak PKS dan Ambisi Indonesia Jadi Kekuatan Global ke-5*.

- <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/15172161/profil-partai-gelora-jejak-pks-dan-ambisi-indonesia-jadi-kekuatan-global-ke>
- Sari, H. (2019, November 9). *Fahri Hamzah Sebut Banyak Kader PKS Pindah ke Partai Gelora*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/09/21232731/fahri-hamzah-sebut-banyak-kader-pks-pindah-ke-partai-gelora>
- Sudrajat. (2019, November 13). *Anis Matta Tegaskan Partai Gelora Bukan PKS Perjuangan*. <https://news.detik.com/berita/d-4782379/anis-matta-tegaskan-partai-gelora-bukan-pks-perjuangan>
- Syarifudin, A. (2020, June 4). *Sudah Diusung 4 Partai, Suharsono-Totok Masih Buka Pintu Koalisi di Pilkada Bantul - Tribunjogja.com*. <https://jogja.tribunnews.com/2020/07/04/sudah-diusung-4-partai-suharsono-totok-masih-buka-pintu-koalisi-di-pilkada-bantul>
- Tempo. (2022, October 15). *KPU: Ada 4 Partai Baru Lolos Verifikasi Administrasi Pemilu 2024 - Nasional Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1645603/kpu-ada-4-partai-baru-lolos-verifikasi-administrasi-pemilu-2024>
- Umaiyah, S. (2020, December 24). *Profil Singkat Pemenang Pilkada Serentak 2020 di DIY*. <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/siti-umaiyah/profil-singkat-pemenang-pilkada-serentak-2020-di-tiga-kabupaten-diy>

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang berkenan untuk menjadi informan dalam proses penelitian ini berlangsung. Serta ucapan terima kasih untuk pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian ini.

Pendanaan

Peneliti tidak mendapatkan bantuan dana dalam penyusunan dan observasi penelitian dari pihak manapun.

Tentang Penulis

Tian Adhia Nugraha merupakan mahasiswa magister di Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Hening Ginanjar Mukti merupakan mahasiswa magister di Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada